

PEMBENTUKAN KARAKTER DALAM MEMPERKUAT NASIONALISME DI KALANGAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA DAVAO, FILIPINA

Alif Aditya Candra¹, Aulia Sholichah Iman Nurchotimah², Jhon Mark Astorga³
Universitas Jambi¹, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon², College of Education,
Granby Colleges of Science and Technology Philippines³
alifaditya@unja.ac.id¹, aualiasin@uinssc.ac.id², markapinya14@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to examine how character formation fosters nationalism among senior high school students in Davao City, Philippines. Specifically, it explores the integration of national values within the formal curriculum, the role of school rituals and symbolic practices, the influence of teacher modeling, and the development of student agency in a multicultural context. The research employed a qualitative multiple-case study design involving 33 participants, including 24 students, 6 teachers, and 3 school administrators. Data were collected through semi-structured interviews, focus group discussions, classroom observations, and document analysis, and were analyzed using thematic analysis. The findings reveal that nationalism is fostered through the systematic integration of civic values in classroom instruction, reinforced by school rituals such as flag ceremonies and national commemorations. Teacher modeling and democratic classroom climate significantly influence students' internalization of national values. Moreover, students demonstrate inclusive and critical forms of nationalism, particularly when engaged in participatory civic activities. However, challenges such as routine-based rituals and academic pressures may limit deeper reflection. The study concludes that effective character formation requires reflective pedagogy, inclusive practices, and meaningful civic engagement to cultivate responsible and participatory nationalism. It is recommended that schools strengthen dialogical teaching approaches and integrate experiential civic activities to enhance national identity formation.

Keywords: character formation, nationalism, civic education, multicultural education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembentukan karakter berperan dalam menumbuhkan nasionalisme pada siswa Sekolah Menengah Atas di Davao City, Filipina. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum formal, peran ritual dan praktik simbolik sekolah, pengaruh keteladanan guru, serta perkembangan agen siswa dalam konteks multikultural. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus berganda yang melibatkan 33 partisipan, terdiri dari 24 siswa, 6 guru, dan 3 administrator sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, diskusi kelompok terarah, observasi kelas, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme ditumbuhkan melalui integrasi sistematis nilai-nilai kewargaan dalam

pembelajaran di kelas yang diperkuat melalui ritual sekolah seperti upacara bendera dan peringatan hari nasional. Keteladanan guru dan iklim kelas yang demokratis berperan penting dalam internalisasi nilai-nilai kebangsaan pada siswa. Selain itu, siswa menunjukkan bentuk nasionalisme yang inklusif dan kritis, terutama ketika terlibat dalam kegiatan partisipatif kewargaan. Namun demikian, terdapat tantangan berupa ritual yang bersifat rutin dan tekanan akademik yang dapat membatasi refleksi mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan karakter yang efektif memerlukan pedagogi reflektif, praktik inklusif, dan keterlibatan kewargaan yang bermakna untuk membentuk nasionalisme yang bertanggung jawab dan partisipatif. Oleh karena itu, sekolah direkomendasikan untuk memperkuat pendekatan dialogis dalam pembelajaran serta mengintegrasikan kegiatan kewargaan berbasis pengalaman guna meningkatkan pembentukan identitas nasional siswa.

Kata Kunci: pembentukan karakter, nasionalisme, pendidikan kewargaan, pendidikan multicultural.

A. Pendahuluan

Kota Davao dipilih sebagai lokasi penelitian kualitatif ini karena bobot demografis dan kompleksitas sosiobudayanya. Dengan populasi sekitar 1.776.949 jiwa menurut sensus 2020, Kota Davao adalah salah satu pusat kota terbesar di Filipina dan menampung populasi siswa yang beragam di sekolah menengah atas negeri dan swasta; skala demografis ini menjadikannya lokasi yang bermakna untuk mempelajari bagaimana proses berbasis sekolah memengaruhi sikap kewarganegaraan kaum muda (Vetruba, 2024).

Kebijakan pendidikan nasional di Filipina mengedepankan pembentukan nilai dan pendidikan

karakter sebagai komponen pendidikan dasar. Departemen Pendidikan (DepEd) mempertahankan inisiatif kurikuler dan programatik yang bertujuan untuk pembentukan nilai dan kewarganegaraan (termasuk kegiatan tingkat sekolah menengah atas), dan pendaftaran sekolah menengah atas tetap besar — di seluruh negeri terdapat sekitar 2,1 juta siswa sekolah menengah atas yang dilaporkan pada periode 2022–2023 — menunjukkan penekanan kebijakan dan skala praktis di mana intervensi beroperasi. Pola kebijakan dan pendaftaran ini memberikan latar belakang kelembagaan untuk meneliti bagaimana pembentukan karakter

diwujudkan di sekolah (Paqueo, 2023).

Meskipun ada dukungan kebijakan yang eksplisit, penelitian empiris di Filipina menunjukkan implementasi yang tidak merata dan hasil yang beragam untuk pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Studi berbasis sekolah dan regional baru-baru ini menunjukkan tingkat nasionalisme yang beragam di kalangan siswa sekolah menengah atas dan menyoroti bahwa isi kurikulum, perspektif guru, kegiatan ekstrakurikuler, sosialisasi keluarga, dan paparan media semuanya berinteraksi dengan cara yang kompleks untuk membentuk keterikatan kewarganegaraan. Ketidakmerataan ini menunjukkan perlunya eksplorasi kualitatif mendalam untuk memahami mekanisme — bukan hanya apakah nilai-nilai diajarkan, tetapi bagaimana praktik pembentukan karakter dialami dan ditafsirkan oleh siswa dan pendidik dalam konteks lokal.

Dinamika regional unik Kota Davao - termasuk pluralisme budaya (kelompok Lumad pribumi, komunitas Moro di wilayah Mindanao yang lebih luas, dan populasi migran Visayan/Luzon), sejarah identitas

politik lokal, dan pengalaman dengan konflik regional dan inisiatif pembangunan perdamaian — menjadikannya kasus yang sangat mengungkap untuk mempelajari hubungan antara pendidikan karakter dan nasionalisme. Kajian tentang identitas dan respons lokal di Mindanao menyoroti bagaimana narasi nasional dapat dipantulkan melalui sejarah regional, menunjukkan bahwa upaya pembentukan karakter di sekolah-sekolah Davao dapat menghasilkan hasil yang mencerminkan negosiasi antara cita-cita nasional dan identitas lokal. Investigasi mediasi ini sangat penting untuk memahami apakah dan bagaimana nasionalisme dipupuk dalam lingkungan sekolah (Lopez, 2023).

Secara konseptual, studi ini menempatkan "pembentukan karakter" pada persimpangan pendidikan moral, pendidikan kewarganegaraan, dan budaya sekolah: studi ini memperlakukan karakter bukan sebagai satu sifat tunggal tetapi sebagai serangkaian disposisi (misalnya, tanggung jawab kewarganegaraan, penghormatan terhadap keragaman, pengetahuan patriotik) yang ditumbuhkan melalui

pelajaran eksplisit, teladan guru, ritual sekolah, dan praktik ekstrakurikuler. Kerangka kerja internasional tentang kewarganegaraan global dan pendidikan kewarganegaraan menekankan program yang terintegrasi dan peka terhadap konteks — sebuah pendekatan yang memandu fokus penelitian ini pada kurikulum formal dan kehidupan sekolah informal sebagai unsur yang saling membentuk keterikatan nasional siswa (Neumann, 2020).

Secara metodologis, desain kualitatif (wawancara semi-terstruktur dengan siswa, kelompok fokus dengan guru, observasi kelas, dan analisis dokumen kebijakan dan kurikulum sekolah) paling cocok untuk menguraikan aspek prosedural dan pembuatan makna dari pembentukan karakter. Barbieto (2024) Penelitian kualitatif sebelumnya dari Davao tentang pandangan guru dan praktik pembentukan karakter menunjukkan baik kelayakan pendekatan ini maupun jenis wawasan yang kaya dan berakar lokal yang dihasilkannya mengenai tantangan implementasi dan adaptasi kontekstual di dalam sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini akan secara sengaja mengambil sampel siswa dan pendidik SMA di

beberapa sekolah di Kota Davao untuk menangkap variasi dalam praktik dan makna Archuleta (2022).

Vertuba (2024) Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini ada tiga: (1) secara empiris, penelitian ini akan menghasilkan deskripsi mendalam tentang bagaimana pembentukan karakter dipraktikkan di SMA Davao dan bagaimana siswa menceritakan rasa kepemilikan nasional mereka; (2) secara teoritis, penelitian ini akan mengklarifikasi jalur yang menghubungkan inisiatif karakter berbasis sekolah dengan manifestasi nasionalisme di kalangan remaja dalam lingkungan regional multi-etnis; dan (3) secara praktis, penelitian ini akan menawarkan rekomendasi berbasis bukti bagi pendidik dan pembuat kebijakan yang berupaya memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan dan nasional sambil tetap memperhatikan identitas lokal dan pluralisme. Dengan memusatkan suara siswa dan praktik tingkat sekolah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi baik kepada praktik pendidikan lokal di Kota Davao maupun debat yang lebih luas tentang peran pendidikan dalam sosialisasi kewarganegaraan formatif di Filipina.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus berganda untuk mengeksplorasi bagaimana pembentukan karakter menumbuhkan nasionalisme di kalangan siswa SMA di Kota Davao, Filipina. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, persepsi, pengalaman hidup, dan praktik sekolah dari perspektif siswa, guru, dan administrator (Creswell & Creswell, 2018; Merriam & Tisdell, 2016). Desain studi kasus berganda memungkinkan peneliti untuk memeriksa praktik pendidikan karakter di beberapa sekolah dan membandingkan persamaan dan perbedaan dalam implementasi dan dampaknya, yang konsisten dengan prosedur studi kasus yang diuraikan oleh Yin (2018). Desain ini tepat untuk menyelidiki fenomena sosial yang kompleks seperti nasionalisme dan pembentukan karakter, yang tidak dapat diukur secara memadai hanya melalui data numerik (Creswell & Creswell, 2018).

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh siswa SMA (Kelas 11 dan Kelas 12), guru, dan administrator sekolah di Kota Davao yang terlibat

dalam proses pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Namun, karena pertimbangan praktis dan sifat kualitatif penelitian, kelompok partisipan yang lebih kecil dipilih sebagai sampel penelitian. Studi ini menerapkan pengambilan sampel bertujuan untuk mengidentifikasi partisipan yang memiliki pengalaman langsung dengan kegiatan pendidikan karakter dan program sekolah yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan dan nasional (Merriam & Tisdell, 2016). Sampel tersebut mencakup 24 siswa (12 dari Kelas 11 dan 12 dari Kelas 12), 6 guru yang mengajar mata pelajaran seperti Studi Sosial, Pendidikan Nilai, atau Pendidikan Kewarganegaraan, dan 3 administrator sekolah (seperti kepala sekolah, konselor bimbingan, atau koordinator urusan siswa). Secara total, 33 partisipan terlibat dalam penelitian ini. Siswa dipilih berdasarkan partisipasi aktif mereka dalam program sekolah seperti upacara pengibaran bendera, organisasi kepemimpinan, dan kegiatan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Guru dan administrator dipilih berdasarkan pengalaman profesional minimal dua tahun dan keterlibatan langsung

dalam inisiatif pembentukan karakter di sekolah mereka.

Penelitian ini dilakukan selama empat bulan, dari Agustus hingga November 2026. Pada bulan pertama, peneliti memperoleh izin penelitian dari pihak sekolah dan mendapatkan persetujuan etik. Persetujuan informed consent dikumpulkan dari semua peserta, dan persetujuan orang tua diperoleh untuk siswa di bawah usia 18 tahun. Bulan kedua dan ketiga didedikasikan untuk pengumpulan data, termasuk wawancara, diskusi kelompok fokus, observasi kelas, dan analisis dokumen. Bulan terakhir difokuskan pada verifikasi data melalui pengecekan anggota, pengorganisasian data, pengkodean, dan analisis tematik pendahuluan. Prosedur sistematis ini selaras dengan protokol penelitian kualitatif yang direkomendasikan oleh Creswell dan Creswell (2018).

Data dikumpulkan melalui empat teknik utama untuk memastikan temuan yang komprehensif dan triangulasi. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan secara individual dengan semua peserta. Setiap wawancara berlangsung sekitar 45–60 menit dan direkam

audio dengan izin. Kedua, dua diskusi kelompok fokus dilakukan dengan siswa untuk menangkap perspektif kolektif dan pengalaman bersama. Ketiga, observasi kelas dilakukan pada mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan atau nilai-nilai untuk memeriksa strategi guru dan integrasi nilai-nilai nasional. Keempat, analisis dokumen dilakukan pada pernyataan visi dan misi sekolah, panduan kurikulum, rencana pelajaran, dan buku pegangan siswa. Penggunaan berbagai sumber data memperkuat triangulasi dan meningkatkan kredibilitas (Miles dkk., 2014).

Semua wawancara ditranskripsikan secara verbatim sebelum analisis. Studi ini menggunakan analisis tematik yang mengikuti enam langkah sistematis: pengenalan data, pembuatan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, dan pembuatan laporan akhir, seperti yang diusulkan oleh Braun dan Clarke (2006). Selain itu, analisis mengikuti pendekatan tematik reflektif untuk memastikan kedalaman interpretatif dan refleksivitas peneliti (Braun & Clarke, 2019). Pengkodean dilakukan secara manual

menggunakan perangkat lunak pengolah kata dan spreadsheet untuk mengatur kategori dan tema. Proses pengkodean dipandu oleh prosedur yang diuraikan oleh Saldaña (2021), yang menekankan siklus pengkodean sistematis dan berulang. Analisis difokuskan pada identifikasi pola yang terkait dengan praktik pendidikan karakter, pengalaman siswa, ekspresi nasionalisme, dan pengaruh budaya sekolah.

Untuk memastikan data valid, penelitian ini mengikuti prosedur validasi kualitatif yang telah ditetapkan. Kredibilitas dicapai melalui pengecekan anggota dan triangulasi (Lincoln & Guba, 1985). Transferabilitas didukung dengan memberikan deskripsi mendalam tentang konteks penelitian dan partisipan. Keandalan dipertahankan dengan mendokumentasikan prosedur penelitian secara rinci untuk memungkinkan replikasi, sementara konfirmabilitas dipastikan melalui pengecekan anggota.

termasuk jejak audit dan jurnal reflektif (Lincoln & Guba, 1985). Strategi-strategi ini selaras dengan standar yang diterima secara luas untuk memastikan ketelitian dalam penelitian kualitatif.

Pertimbangan etis dipatuhi secara ketat sepanjang penelitian. Partisipasi bersifat sukarela, dan peserta berhak untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. Kerahasiaan dilindungi dengan menggunakan nama samaran dalam transkrip dan laporan. Semua rekaman dan dokumen digital disimpan dalam file yang dilindungi kata sandi yang hanya dapat diakses oleh peneliti. Prosedur, kriteria pengambilan sampel, langkah-langkah pengumpulan data, dan teknik analitis dijelaskan secara rinci untuk memastikan kejelasan dan kemampuan replikasi, konsisten dengan transparansi metodologis dalam penelitian studi kasus kualitatif (Yin, 2018).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Integrasi Nilai-Nilai Nasional dalam Kurikulum Formal

Tema ini muncul dari analisis wawancara semi-terstruktur dengan 24 siswa SMA, 6 guru, dan 3 administrator, dua diskusi kelompok fokus siswa, empat observasi kelas, dan analisis dokumen panduan kurikulum dan rencana pelajaran. Melalui analisis tematik, kode-kode yang berulang seperti “integrasi

identitas nasional,” “diskusi tanggung jawab kewarganegaraan,” “refleksi sejarah,” dan “pembelajaran kontekstual” dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai nasional tertanam dalam pengajaran formal. Triangulasi wawancara, observasi, dan dokumen sekolah memperkuat kredibilitas tema ini.

Data wawancara dari guru menunjukkan bahwa nilai-nilai nasional secara sengaja dimasukkan ke dalam mata pelajaran seperti Studi Sosial, Seni Kontemporer Filipina, Memahami Budaya, Masyarakat dan Politik (UCSP), dan Pendidikan Nilai. Guru menjelaskan bahwa diskusi tentang hak-hak konstitusional, partisipasi demokratis, dan perjuangan sejarah untuk kemerdekaan dibingkai sebagai kesempatan untuk menumbuhkan patriotisme dan tanggung jawab kewarganegaraan. Seorang guru Studi Sosial menyatakan bahwa pelajaran tentang Revolusi Filipina dan Darurat Militer bukan hanya konten sejarah tetapi dirancang untuk mendorong siswa untuk “memahami pengorbanan di balik kebebasan kita dan tanggung jawab untuk melindungi demokrasi.” Pernyataan ini didukung

oleh analisis dokumen rencana pembelajaran, yang menunjukkan tujuan pembelajaran eksplisit yang berkaitan dengan kesadaran kewarganegaraan dan identitas nasional.

Observasi kelas lebih lanjut mengkonfirmasi bahwa guru mengintegrasikan komponen reflektif ke dalam pengajaran. Selama pelajaran yang diamati, guru memfasilitasi diskusi kelas yang menghubungkan peristiwa sejarah dengan isu-isu kontemporer di Filipina, khususnya di Mindanao. Misalnya, di salah satu kelas UCSP, diskusi tentang keragaman budaya mengarahkan siswa untuk merefleksikan kerja sama antaragama di Kota Davao. Guru mendorong siswa untuk mempertimbangkan bagaimana persatuan di antara komunitas Kristen, Muslim, dan masyarakat adat berkontribusi pada stabilitas nasional. Strategi pengajaran seperti itu menunjukkan bahwa nasionalisme tidak hanya disajikan sebagai loyalitas simbolis tetapi sebagai keterlibatan kewarganegaraan yang inklusif dalam masyarakat multikultural.

Wawancara siswa dan diskusi kelompok fokus mengungkapkan

bahwa kontekstualisasi secara signifikan meningkatkan apresiasi mereka terhadap identitas nasional. Banyak peserta melaporkan bahwa ketika guru menghubungkan pelajaran dengan isu-isu kehidupan nyata—seperti upaya pembangunan perdamaian di Mindanao, tantangan tata kelola lokal, atau kampanye perlindungan lingkungan—mereka merasakan hubungan emosional yang lebih kuat dengan konsep nasionalisme. Siswa menggambarkan nasionalisme sebagai "peduli terhadap apa yang terjadi di komunitas kita" dan "berpartisipasi dalam memecahkan masalah nasional." Tanggapan-tanggapan ini menunjukkan bahwa pengajaran berbasis pengalaman dan konteks mendorong apa yang dapat digambarkan sebagai nasionalisme reflektif daripada patriotisme pasif.

Namun, tidak semua peserta menganggap integrasi kurikulum sama efektifnya. Beberapa siswa mencatat bahwa pelajaran tertentu tetap berorientasi pada ujian dan berfokus pada hafalan tanggal, hukum, dan definisi. Dalam kasus seperti itu, diskusi tentang nasionalisme dianggap abstrak dan terlepas dari pengalaman pribadi.

Catatan observasi mendukung temuan ini, terutama dalam sesi di mana kendala waktu membatasi dialog interaktif. Ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai nasional tertanam secara struktural dalam kurikulum, kedalaman pedagogis dan strategi pengajaran secara signifikan memengaruhi sejauh mana siswa menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Dari perspektif analitis, integrasi nilai-nilai nasional dalam kurikulum formal tampaknya berfungsi pada dua tingkatan: integrasi struktural dan penerapan pedagogis. Secara struktural, dokumen kurikulum dengan jelas mencakup kompetensi kewarganegaraan dan tujuan identitas nasional. Namun, secara pedagogis, efektivitasnya bergantung pada kemampuan guru untuk mengkontekstualisasikan konten, mendorong dialog, dan menghubungkan pelajaran dengan realitas kehidupan siswa. Analisis tematik menunjukkan bahwa nasionalisme yang bermakna berkembang ketika siswa diajak untuk terlibat secara kritis dengan narasi sejarah dan isu-isu sosial kontemporer, bukan sekadar mereproduksi informasi.

2. Ritual Sekolah dan Praktik Simbolis sebagai Alat Pembentukan Karakter

Tema ini dihasilkan dari data triangulasi yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan 24 siswa, 6 guru, dan 3 administrator, dua diskusi kelompok fokus (FGD), observasi non-partisipan terhadap upacara sekolah, dan analisis dokumen program kegiatan sekolah dan buku pegangan siswa. Selama proses pengkodean, kode-kode yang berulang seperti "kedisiplinan upacara pengibaran bendera," "makna lagu kebangsaan," "identitas bersama," "patriotisme simbolis," dan "partisipasi rutin" dikelompokkan ke dalam kategori tematik yang lebih luas yang menggambarkan peran ritual sekolah dalam membentuk karakter dan nasionalisme. Konsistensi temuan di seluruh sumber data memperkuat kredibilitas tema ini.

Data observasi memainkan peran penting dalam mengkonfirmasi bagaimana ritual diimplementasikan. Peneliti menghadiri empat upacara pengibaran bendera mingguan dan dua acara perayaan nasional (program Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan Nasional). Catatan lapangan mendokumentasikan prosedur terstruktur: siswa berkumpul

berdasarkan kelas, menjaga postur tubuh yang tepat selama lagu kebangsaan, dan mendengarkan dengan saksama pidato singkat yang disampaikan oleh guru atau administrator. Upacara-upacara tersebut mengikuti format standar, yang menunjukkan rutinitas yang terinstitusionalisasi yang dirancang untuk memperkuat ketertiban, disiplin, dan partisipasi kolektif. Perilaku yang diamati ini kemudian diperiksa silang dengan tanggapan wawancara, memastikan triangulasi metodologis seperti yang diuraikan dalam desain penelitian.

Wawancara siswa mengungkapkan bahwa partisipasi rutin dalam upacara pengibaran bendera menumbuhkan rasa identitas dan kebersamaan kolektif. Banyak peserta menggambarkan perasaan "terhubung dengan sesama warga Filipina" ketika menyanyikan lagu kebangsaan bersama. Beberapa siswa mengaitkan berdiri dengan hormat selama upacara dengan disiplin dan rasa hormat terhadap simbol-simbol nasional. Dalam FGD, siswa mengungkapkan bahwa ritual-ritual ini mengingatkan mereka bahwa "kita adalah bagian dari satu negara meskipun kita memiliki latar belakang

yang berbeda." Persepsi ini sangat signifikan dalam konteks multikultural Kota Davao, di mana siswa dari berbagai kelompok etnis dan agama berbagi ruang pendidikan yang sama.

Guru dan administrator menekankan bahwa ritual-ritual ini sengaja dirancang sebagai momen pembentukan karakter daripada persyaratan prosedural. Data wawancara menunjukkan bahwa pendidik sering menyampaikan pesan reflektif singkat selama upacara, menghubungkan pengorbanan bersejarah para pahlawan nasional dengan tanggung jawab kontemporer kaum muda. Analisis dokumen program sekolah mengkonfirmasi bahwa hari libur nasional dirayakan dengan kegiatan tematik seperti lomba esai, presentasi budaya, dan kampanye kesadaran kewarganegaraan. Kegiatan-kegiatan ini memperluas praktik simbolis ke dalam keterlibatan partisipatif, memperkuat kebijakan kewarganegaraan seperti persatuan, rasa syukur, dan kebanggaan nasional.

Namun, diskusi kelompok fokus mengungkapkan variasi dalam keterlibatan siswa. Sementara banyak siswa menggambarkan perasaan

bangga dan inspirasi, yang lain mengakui bahwa rutinitas yang berulang terkadang terasa mekanis atau wajib. Beberapa peserta menyatakan bahwa tanpa penjelasan, upacara berisiko menjadi tindakan kebiasaan daripada pengalaman yang bermakna. Catatan observasi mendukung temuan ini, terutama selama minggu-minggu ketika pidato tidak ada dan upacara dilakukan dengan cepat karena keterbatasan waktu. Dalam kasus-kasus ini, siswa tampak memperhatikan tetapi netral secara emosional, menunjukkan bahwa ritual saja tidak menjamin internalisasi nilai-nilai.

Analisis tematik menunjukkan bahwa efektivitas ritual sekolah dalam menumbuhkan nasionalisme bergantung pada kerangka interpretatif dan dialog reflektif. Ketika guru mengkontekstualisasikan upacara dengan menjelaskan signifikansi historis dan kewarganegaraannya, siswa menunjukkan keterlibatan emosional yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih dalam. Sebaliknya, ketika ritual dilakukan semata-mata sebagai aktivitas kepatuhan, dampaknya terhadap pembentukan karakter menjadi terbatas. Perbedaan ini

muncul secara konsisten di seluruh wawancara, FGD, dan observasi, memperkuat pentingnya mediasi pedagogis dalam praktik simbolik.

3. Peran Guru sebagai Teladan dan Otoritas Moral

Tema ini muncul secara konsisten di berbagai sumber data, termasuk wawancara semi-terstruktur dengan 24 siswa, 6 guru, dan 3 administrator, dua diskusi kelompok fokus, dan empat observasi kelas yang dilakukan selama mata pelajaran yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan nilai-nilai. Selama proses pengkodean, ungkapan yang berulang seperti "guru sebagai contoh," "keadilan," "rasa hormat," "pengaruh sikap," "diskusi terbuka," dan "teladan" diidentifikasi. Kode-kode ini dikelompokkan ke dalam kategori tematik yang lebih luas yang diberi label Pemodelan Guru dan Otoritas Moral. Konvergensi narasi siswa, refleksi guru, dan catatan observasi memperkuat kredibilitas dan keandalan tema ini, sejalan dengan strategi triangulasi yang diuraikan dalam desain penelitian.

Temuan wawancara mengungkapkan bahwa siswa memandang guru bukan hanya

sebagai pengajar tetapi sebagai teladan moral yang perilakunya secara signifikan memengaruhi pemahaman mereka tentang nasionalisme. Banyak siswa menyatakan bahwa mereka mengamati bagaimana guru menanggapi isu-isu nasional yang sensitif, memperlakukan siswa dari berbagai latar belakang, dan menunjukkan tanggung jawab kewarganegaraan. Sebagai contoh, para siswa menyoroti bahwa guru yang menunjukkan keadilan dalam penilaian, menghindari komentar diskriminatif, dan menghormati perbedaan agama dan budaya dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai nasional tentang kesetaraan dan persatuan. Persepsi ini sangat bermakna dalam konteks multikultural Kota Davao, di mana keragaman adalah realitas kehidupan sehari-hari di sekolah.

Para guru, selama wawancara, mengakui peran mereka sebagai penyebar nilai di luar pengajaran akademis. Beberapa peserta menekankan bahwa nasionalisme tidak boleh disamakan dengan loyalitas tanpa syarat tetapi dengan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Seorang guru menjelaskan

bahwa menunjukkan integritas, ketepatan waktu, dan akuntabilitas dalam praktik sekolah sehari-hari adalah cara praktis untuk mengajarkan patriotisme. Hal ini sejalan dengan konseptualisasi studi tentang pembentukan karakter sebagai proses relasional dan pengalaman daripada semata-mata didorong oleh kurikulum.

Observasi kelas lebih lanjut mendukung tema ini. Dalam beberapa sesi, guru memfasilitasi diskusi tentang isu-isu sosial kontemporer seperti tata kelola, korupsi, tantangan lingkungan, dan hubungan antaragama di Mindanao. Alih-alih memaksakan sudut pandang tunggal, guru mendorong siswa untuk mengungkapkan pendapat dengan hormat dan mendukung argumen dengan bukti. Catatan observasi mendokumentasikan contoh-contoh di mana guru memoderasi debat, memastikan bahwa perbedaan pendapat tetap konstruktif. Praktik pengajaran seperti itu mendorong pemikiran kritis dan dialog demokratis, memperkuat bentuk nasionalisme yang berakar pada partisipasi sipil daripada konformitas pasif.

Diskusi kelompok fokus mengungkapkan bahwa siswa merasa

lebih percaya diri dalam mengekspresikan keprihatinan nasional ketika guru menciptakan lingkungan kelas yang aman secara psikologis. Siswa menggambarkan bagaimana diskusi terbuka membantu mereka memahami bahwa mencintai negara sendiri mencakup tanggung jawab untuk mempertanyakan kebijakan dan mengadvokasi perbaikan. Ini mencerminkan munculnya apa yang digambarkan peserta sebagai "patriotisme yang bertanggung jawab," menunjukkan bahwa otoritas moral yang dijalankan melalui dialog mendorong keterlibatan reflektif.

Analisis tematik menunjukkan bahwa otentisitas guru secara signifikan memperkuat internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan siswa. Ketika guru secara konsisten mencontohkan rasa hormat, inklusivitas, dan keterlibatan sipil yang bertanggung jawab, siswa lebih cenderung mengadopsi disposisi serupa. Sebaliknya, siswa mencatat bahwa ketidakkonsistenan antara kata-kata dan tindakan guru melemahkan kredibilitas pesan karakter. Temuan ini menyoroti bahwa pembentukan karakter bersifat

relasional dan bergantung pada otentisitas yang dirasakan.

4. Peran Siswa dan Nasionalisme Kritis dalam Konteks Multikultural

Tema ini muncul dari analisis tematik transkrip wawancara, diskusi kelompok fokus, observasi kelas, dan tinjauan dokumen program organisasi mahasiswa. Selama proses pengkodean, kode-kode yang berulang seperti “menghormati keragaman,” “persatuan dalam perbedaan,” “kritik yang bertanggung jawab,” “partisipasi aktif,” “kepemimpinan mahasiswa,” dan “keterlibatan masyarakat” diidentifikasi. Kode-kode ini dikelompokkan ke dalam tema interpretatif yang lebih luas yang menggambarkan bagaimana mahasiswa menjalankan agensi dalam membentuk pemahaman mereka tentang nasionalisme dalam lingkungan multikultural Kota Davao. Tema tersebut divalidasi melalui triangulasi di seluruh kelompok partisipan dan metode pengumpulan data seperti yang diuraikan dalam desain penelitian.

Temuan wawancara mengungkapkan bahwa mahasiswa mengkonseptualisasikan

nasionalisme dalam istilah inklusif. Alih-alih mendefinisikan nasionalisme sebagai superioritas atau eksklusif, para partisipan secara konsisten menggambarkannya sebagai menghormati semua orang Filipina tanpa memandang etnis, agama, atau latar belakang budaya. Mahasiswa secara eksplisit merujuk pada koeksistensi komunitas Kristen, Muslim, dan masyarakat adat di Kota Davao sebagai pembentuk pemahaman mereka tentang persatuan nasional. Beberapa partisipan menyatakan bahwa “menjadi orang Filipina berarti menerima perbedaan kita” dan “persatuan tidak berarti kesamaan.” Pernyataan-pernyataan ini digaungkan dalam diskusi kelompok fokus, di mana para siswa menekankan pentingnya kerja sama antaragama dan pemahaman budaya dalam menjaga keharmonisan sosial.

Observasi kelas mendukung narasi-narasi ini. Dalam pelajaran yang membahas identitas budaya dan kohesi sosial, siswa secara aktif berpartisipasi dalam dialog tentang keragaman dan rasa memiliki nasional. Guru memfasilitasi diskusi tentang pluralisme dan mendorong siswa untuk berbagi perspektif dari

komunitas mereka sendiri. Catatan observasi mencatat pertukaran yang penuh hormat di antara siswa dari berbagai latar belakang agama dan etnis, menunjukkan bahwa nasionalisme inklusif bukan hanya teoritis tetapi dipraktikkan melalui interaksi sehari-hari. Hal ini memperkuat interpretasi bahwa identitas nasional dalam konteks ini dibangun secara relasional melalui pengalaman multikultural yang dialami.

Dimensi penting dari tema ini adalah munculnya apa yang dapat disebut nasionalisme kritis. Siswa tidak menyamakan patriotisme dengan dukungan tanpa syarat terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, banyak yang menyatakan bahwa mempertanyakan ketidakadilan, korupsi, atau pemerintahan yang tidak efektif adalah bagian dari kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Selama wawancara, siswa menjelaskan bahwa "mencintai negara berarti membantu memperbaikinya" dan bahwa kritik sipil, ketika diungkapkan dengan hormat, memperkuat demokrasi. Perspektif ini juga diamati dalam debat di kelas di mana siswa menganalisis peristiwa terkini dan isu-

isu kebijakan secara kritis namun konstruktif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa nasionalisme di kalangan siswa ini didasarkan pada akuntabilitas demokratis daripada kesetiaan buta.

Agensi siswa sangat terlihat di antara peserta yang terlibat dalam organisasi kepemimpinan, dewan siswa, dan program pengabdian masyarakat. Data dari wawancara dan analisis dokumen laporan kegiatan sekolah menunjukkan bahwa siswa-siswa ini berpartisipasi dalam pekerjaan sukarela, kampanye lingkungan, operasi bantuan selama bencana alam, dan program kesadaran sipil yang dipimpin oleh kaum muda. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini menunjukkan rasa tanggung jawab sipil yang lebih kuat dan mengartikulasikan nasionalisme sebagai kontribusi aktif daripada ekspresi simbolis. Data observasi selama kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan sekolah lebih lanjut menggambarkan inisiatif siswa dalam mengorganisir proyek dan berkolaborasi di berbagai kelompok.

Interpretasi tematik menunjukkan bahwa keterlibatan pengalaman secara signifikan

memperkuat internalisasi nilai-nilai nasional siswa. Siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan sipil dunia nyata menunjukkan pemahaman yang lebih berkembang tentang nasionalisme sebagai sesuatu yang berorientasi pada tindakan dan responsif secara sosial. Sebaliknya, siswa dengan keterlibatan ekstrakurikuler yang terbatas cenderung menggambarkan nasionalisme terutama dalam istilah simbolis, seperti menghormati bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan. Pola ini menunjukkan bahwa peran aktif dan partisipasi memperdalam dimensi praktis pembentukan karakter.

5. Challenges in Character Formation

Tema ini muncul melalui analisis tematik sistematis dari transkrip wawancara, diskusi kelompok fokus (FGD), catatan observasi kelas, dan analisis dokumen. Selama proses pengkodean, beberapa kode yang berulang diidentifikasi, termasuk "misinformasi," "pengaruh media sosial," "perpecahan politik," "tekanan akademis," "kendala waktu," "aktivitas kepatuhan," dan "kurangnya refleksi." Kode-kode ini dikelompokkan ke dalam tema yang lebih luas yang

menggambarkan tantangan struktural dan kontekstual yang membatasi efektivitas pembentukan karakter dalam menumbuhkan nasionalisme. Kredibilitas tema ini diperkuat melalui triangulasi di berbagai sumber data dan kategori partisipan, seperti yang diuraikan dalam metodologi penelitian.

Tantangan utama pertama yang diidentifikasi adalah pengaruh paparan media digital terhadap persepsi siswa tentang isu-isu nasional. Dalam wawancara dan FGD, banyak siswa mengakui bahwa platform media sosial secara signifikan membentuk pemahaman mereka tentang politik, pemerintahan, dan identitas nasional. Beberapa partisipan mengakui menemukan informasi yang menyesatkan, konten politik yang sarat emosi, dan narasi yang terpolarisasi secara daring. Siswa menggambarkan perasaan bingung ketika diskusi di kelas bertentangan dengan narasi yang beredar di platform digital. Para guru juga menyatakan kekhawatiran bahwa informasi yang salah menyebar dengan cepat dan terkadang merusak upaya di kelas untuk mempromosikan perspektif kritis dan seimbang. Temuan ini konsisten di seluruh

sekolah dan berulang kali disebutkan selama wawancara, menunjukkan pentingnya media digital sebagai faktor eksternal yang memengaruhi pembentukan karakter.

Pengamatan di kelas mendukung temuan ini. Dalam beberapa sesi di mana isu-isu politik kontemporer dibahas, siswa merujuk pada konten daring, terkadang tanpa memverifikasi sumbernya. Guru sering kali perlu mengarahkan diskusi ke arah penalaran berbasis bukti. Ini menunjukkan bahwa sementara sekolah berupaya menumbuhkan nasionalisme reflektif, lingkungan digital memperkenalkan interpretasi yang bersaing tentang isu-isu nasional. Oleh karena itu, tantangannya terletak tidak hanya pada pengajaran nilai-nilai kewarganegaraan tetapi juga pada penguatan literasi media dan keterampilan evaluasi kritis siswa.

Tantangan kedua yang diidentifikasi adalah beban kerja akademik dan kendala waktu. Baik siswa maupun guru melaporkan bahwa kurikulum sekolah menengah atas yang menuntut membatasi peluang untuk refleksi yang lebih panjang tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Siswa

menjelaskan bahwa persiapan untuk penilaian, tenggat waktu proyek, dan tugas kinerja sering kali diprioritaskan daripada diskusi yang lebih mendalam tentang identitas nasional. Guru juga mencatat bahwa meskipun panduan kurikulum mencakup tujuan kewarganegaraan, tekanan waktu terkadang mengharuskan mereka untuk fokus terutama pada cakupan konten. Catatan observasi mengkonfirmasi bahwa beberapa pelajaran disampaikan dalam format ceramah karena keterbatasan waktu pengajaran, sehingga mengurangi kesempatan untuk dialog interaktif. Temuan ini menunjukkan bahwa tuntutan akademis struktural dapat membatasi keterlibatan karakter yang bermakna.

Tantangan ketiga berkaitan dengan persepsi kegiatan pendidikan karakter sebagai berorientasi pada kepatuhan daripada transformatif. Meskipun ritual sekolah, program penjangkauan, dan kegiatan kewarganegaraan dilakukan secara teratur, beberapa siswa melaporkan bahwa partisipasi terkadang terasa wajib. Dalam FGD, beberapa peserta menyatakan bahwa mereka menghadiri program "karena diwajibkan," bukan karena mereka

merasa terhubung secara pribadi dengan nilai-nilai yang dipromosikan. Analisis dokumen menunjukkan bahwa banyak kegiatan kewarganegaraan dijadwalkan secara sistematis dalam kalender sekolah, tetapi komponen reflektif tidak selalu didokumentasikan secara eksplisit. Observasi terhadap beberapa acara sekolah menunjukkan organisasi yang kuat tetapi diskusi yang difasilitasi terbatas setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa refleksi yang disengaja, kegiatan pembentukan karakter berisiko menjadi rutinitas prosedural daripada pengalaman belajar yang diinternalisasi.

Analisis tematik menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini tidak meniadakan keberadaan praktik pembentukan karakter yang efektif; sebaliknya, tantangan-tantangan ini mengungkapkan kompleksitas kontekstual yang memengaruhi implementasi. Paparan media digital memperkenalkan narasi eksternal yang bersaing dengan pengajaran berbasis sekolah. Beban kerja akademis membatasi ruang refleksi, dan partisipasi berbasis kepatuhan mengurangi keterlibatan emosional. Temuan ini menyoroti interaksi

dinamis antara upaya kelembagaan dan lingkungan sosial yang lebih luas.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nasionalisme di kalangan siswa SMA di Kota Davao lebih efektif dipupuk ketika nilai-nilai kewarganegaraan dan nasional secara sengaja diintegrasikan ke dalam mata pelajaran kurikulum formal seperti Studi Sosial dan Pendidikan Nilai. Alih-alih muncul secara insidental, identitas nasional tampaknya dipupuk melalui desain pedagogis yang disengaja. Hal ini mendukung pandangan yang lebih luas dalam penelitian pendidikan kualitatif bahwa pemahaman tentang bagaimana peserta didik menafsirkan isi kurikulum membutuhkan perhatian pada pengalaman kelas yang dialami (Creswell & Creswell, 2018). Siswa dalam penelitian ini tidak hanya mengingat informasi faktual tentang sejarah nasional; sebaliknya, mereka mengartikulasikan makna yang berasal dari diskusi reflektif yang menghubungkan narasi sejarah dengan realitas masa kini. Ini menunjukkan bahwa nasionalisme berkembang sebagai proses

interpretatif yang dibentuk melalui lingkungan belajar dialogis.

Integrasi nilai-nilai nasional di berbagai mata pelajaran selaras dengan kajian dalam pendidikan karakter yang menekankan penanaman prinsip-prinsip moral dan kewarganegaraan secara sistematis dalam kurikulum (Merriam & Tisdell, 2016). Ketika konsep kewarganegaraan diintegrasikan ke dalam tujuan pembelajaran terstruktur, rencana pelajaran, dan diskusi kelas, siswa dihadapkan pada kesempatan berulang untuk merefleksikan kewarganegaraan, tanggung jawab, dan rasa memiliki nasional. Temuan saat ini menunjukkan bahwa integrasi tersebut sangat berdampak ketika guru mengkontekstualisasikan pelajaran dalam lingkungan sosial-politik Mindanao. Dengan menghubungkan topik-topik seperti pembangunan perdamaian, tata kelola, dan keragaman budaya dengan realitas kehidupan siswa, pendidik mengubah prinsip-prinsip kewarganegaraan yang abstrak menjadi konstruksi yang bermakna secara sosial. Hal ini mencerminkan pendekatan yang konsisten dengan perspektif pengalaman dan

konstruktivis dalam pendidikan, di mana pengetahuan secara aktif dibangun melalui keterlibatan kontekstual.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kurikulum yang efektif tidak hanya bergantung pada inklusi konten tetapi juga pada pendekatan pedagogis. Analisis tematik mengungkapkan bahwa siswa merespons lebih positif ketika guru memfasilitasi dialog, mendorong refleksi kritis, dan menghubungkan konten historis dengan isu-isu kontemporer. Praktik-praktik tersebut selaras dengan kerangka pendidikan demokratis yang menempatkan sekolah sebagai ruang untuk musyawarah kewarganegaraan daripada transmisi pengetahuan pasif. Dalam hal ini, nasionalisme tidak dibingkai sebagai loyalitas tanpa pertanyaan tetapi sebagai keterikatan reflektif yang didasarkan pada kesadaran sejarah dan tanggung jawab kewarganegaraan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan kewarganegaraan yang bermakna membutuhkan strategi pengajaran partisipatif dan interpretatif.

Namun, studi ini juga mengidentifikasi keterbatasan yang

terkait dengan pengajaran yang berorientasi pada ujian. Siswa melaporkan bahwa ketika pelajaran didominasi oleh hafalan tanggal, definisi, dan ketentuan hukum, keterlibatan mereka dengan nilai-nilai nasional menjadi dangkal. Pengamatan ini menggemakan kekhawatiran dalam literatur pendidikan kualitatif bahwa tekanan penilaian institusional dapat membatasi pembelajaran transformatif (Miles dkk., 2014). Ketika waktu pengajaran sangat diarahkan pada evaluasi standar, peluang untuk dialog kritis dan keterlibatan emosional dapat berkurang. Akibatnya, meskipun kerangka kurikulum secara formal dapat mencakup tujuan kewarganegaraan, kedalaman internalisasi bergantung pada bagaimana pengalaman belajar disusun dalam praktik.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa integrasi kurikulum berfungsi sebagai fondasi struktural untuk menumbuhkan nasionalisme, tetapi efektivitasnya dimediasi oleh kedalaman pedagogis dan relevansi kontekstual. Nasionalisme di kalangan siswa tampaknya berkembang ketika nilai-nilai kewarganegaraan tertanam di

seluruh mata pelajaran, terhubung dengan realitas lokal, dan dieksplorasi melalui diskusi reflektif. Sebaliknya, ketika pembelajaran direduksi menjadi persiapan ujian, potensi transformatif pendidikan karakter berkurang. Oleh karena itu, menyelaraskan desain kurikulum dengan pedagogi dialogis dan peka konteks sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai nasional tidak hanya diajarkan tetapi benar-benar diinternalisasi.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa ritual sekolah—seperti upacara pengibaran bendera mingguan, menyanyikan lagu kebangsaan, dan perayaan peringatan nasional—berfungsi sebagai mekanisme simbolis untuk memperkuat identitas kolektif di antara siswa sekolah menengah atas di Kota Davao. Kajian pendidikan kewarganegaraan kontemporer mengakui bahwa sekolah berfungsi sebagai tempat utama sosialisasi kewarganegaraan, di mana identitas nasional tidak hanya diajarkan secara kognitif tetapi juga diwujudkan secara simbolis (Banks, 2017; Kennedy, 2019). Dalam studi ini, ritual beroperasi sebagai pertunjukan kewarganegaraan terstruktur di mana rasa memiliki nasional secara kolektif diungkapkan

melalui partisipasi yang diwujudkan. Sifat teratur dan terinstitusionalisasi dari upacara-upacara ini menciptakan peluang berulang bagi siswa untuk mengalami identitas bersama, disiplin, dan persatuan, sehingga menormalisasi simbol-simbol nasional. dalam budaya sekolah sehari-hari. Temuan tersebut konsisten dengan perspektif terkini dalam pendidikan kewarganegaraan yang menekankan peran iklim sekolah dan budaya partisipatif dalam membentuk orientasi demokratis dan nasional di kalangan pemuda (Reichert dkk., 2018).

Dimensi emosional dari partisipasi ritual yang diamati dalam penelitian ini lebih lanjut mendukung teori-teori kewarganegaraan afektif saat ini. Penelitian dalam pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa keterikatan nasional diperkuat ketika siswa mengalami keterlibatan emosional bersama daripada hanya menerima instruksi kognitif (Isac dkk., 2018). Siswa dalam penelitian ini melaporkan perasaan bangga, rasa memiliki, dan persatuan, khususnya dalam konteks multikultural Kota Davao. Temuan ini selaras dengan kerangka kerja pendidikan kewarganegaraan multikultural, yang

berpendapat bahwa ritual kolektif dapat mendorong identitas nasional yang inklusif ketika keragaman diakui dan dihormati (Banks, 2017). Dengan demikian, ritual tampaknya berfungsi tidak hanya sebagai persyaratan sekolah formal tetapi juga sebagai jangkar afektif pembentukan identitas yang memperkuat rasa keanggotaan bersama dalam komunitas nasional.

Namun, penelitian ini juga mengungkapkan variabilitas dalam cara siswa menafsirkan praktik-praktik simbolis ini. Beberapa peserta menggambarkan upacara sebagai rutinitas atau mekanis, menunjukkan bahwa pengulangan saja tidak menjamin internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Kajian kualitatif terbaru menyoroti bahwa keterlibatan siswa bergantung pada persepsi otentisitas dan relevansi (Knowles & Castro, 2019). Ketika ritual terlepas dari penjelasan yang bermakna, siswa mungkin patuh secara perilaku tanpa mengalami refleksi kewarganegaraan yang lebih dalam. Temuan ini selaras dengan diskusi kontemporer dalam pendidikan kewarganegaraan, yang memperingatkan terhadap patriotisme performatif yang kurang melibatkan dialog (Westheimer, 2019). Oleh karena itu, efektivitas praktik-praktik

simbolis bergantung pada bagaimana praktik tersebut dibingkai secara pedagogis dan dikontekstualisasikan dalam realitas kehidupan siswa.

Data juga menunjukkan bahwa mediasi guru memainkan peran penting dalam mengubah ritual dari kinerja rutin menjadi pembelajaran kewarganegaraan yang reflektif. Ketika pendidik menghubungkan kegiatan seremonial dengan partisipasi demokratis, kohesi sosial, atau perjuangan historis, siswa melaporkan keterlibatan emosional dan intelektual yang lebih besar. Penelitian tentang iklim kelas yang demokratis menunjukkan bahwa dialog terarah meningkatkan sikap kewarganegaraan dan disposisi partisipatif siswa (Reichert dkk., 2018). Dalam hal ini, ritual menjadi transformatif ketika disertai dengan dialog interpretatif yang menghubungkan tindakan simbolis dengan tanggung jawab kewarganegaraan kontemporer. Integrasi pedagogis penjelasan dan refleksi memperkuat proses interpretatif di mana siswa membangun makna di sekitar simbol-simbol nasional.

Temuan studi ini menyoroti bahwa guru memainkan peran sentral

dalam menumbuhkan nasionalisme melalui pemodelan moral dan otoritas etis. Siswa secara konsisten menggambarkan guru mereka sebagai tokoh berpengaruh yang sikap, keadilan, inklusivitas, dan keterlibatan kewarganegaraannya membentuk pemahaman mereka tentang nilai-nilai nasional. Penelitian kontemporer dalam pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan menegaskan bahwa disposisi demokratis sangat dipengaruhi oleh iklim kelas dan perilaku guru (Reichert, Chen, & Torney-Purta, 2018). Ketika guru menunjukkan integritas, rasa hormat terhadap keragaman, dan keterbukaan terhadap dialog, mereka menumbuhkan lingkungan di mana siswa menginternalisasi norma-norma kewarganegaraan melalui interaksi nyata daripada instruksi abstrak. Dalam konteks ini, pemodelan guru berfungsi sebagai kurikulum implisit yang mentransmisikan nilai-nilai nasional melalui praktik sehari-hari.

Hasil penelitian ini semakin selaras dengan kajian ilmiah yang menekankan bahwa pendidikan moral bersifat relasional. Nucci, Narvaez, dan Krettenauer (2014) berpendapat bahwa pengembangan karakter

sangat berakar pada hubungan sosial dan konsistensi etis yang ditunjukkan oleh figur otoritas. Dalam penelitian ini, siswa menunjukkan bahwa guru yang memperlakukan siswa secara adil dan mendorong diskusi yang penuh hormat tentang isu-isu nasional memperkuat rasa tanggung jawab kewarganegaraan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme diinternalisasi bukan hanya melalui pengetahuan konten tetapi melalui pengamatan bagaimana otoritas dijalankan dengan cara yang etis dan inklusif. Oleh karena itu, otentisitas guru menjadi mekanisme mendasar dalam pembentukan karakter.

Selain itu, fasilitasi dialog terbuka tentang pemerintahan, keadilan sosial, dan identitas budaya mencerminkan apa yang disebut literatur terkini sebagai "iklim kelas yang demokratis." Penelitian menunjukkan bahwa ketika guru mendorong diskusi kritis dan keterlibatan partisipatif, siswa mengembangkan sikap kewarganegaraan dan efikasi politik yang lebih kuat (Knowles & Clark, 2018; Reichert et al., 2018). Dalam penelitian ini, siswa mengartikulasikan nasionalisme sebagai partisipasi yang bertanggung jawab daripada loyalitas

buta, terutama ketika guru membimbing diskusi yang seimbang tentang isu-isu kontroversial. Temuan ini mendukung argumen Westheimer (2019) bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mempromosikan bentuk-bentuk kewarganegaraan yang kritis dan berorientasi pada keadilan daripada kepatuhan pasif. Dengan demikian, pemodelan guru tidak hanya memperkuat keterikatan nasional tetapi juga membentuk kualitas keterikatan tersebut—apakah itu otoriter atau berlandaskan demokrasi.

Selain itu, dalam lingkungan pendidikan multikultural seperti Kota Davao, perilaku etis guru memiliki signifikansi khusus. Banks (2017) menekankan bahwa dalam masyarakat yang beragam, guru harus menjadi teladan kewarganegaraan inklusif untuk mencegah bentuk-bentuk nasionalisme yang eksklusif atau etnosentris. Siswa dalam penelitian ini melaporkan bahwa guru yang menghormati latar belakang agama dan budaya yang berbeda memperkuat persepsi mereka tentang nasionalisme sebagai persatuan dalam keberagaman. Ini menunjukkan bahwa otoritas moral yang

berlandaskan pluralisme berkontribusi pada pembentukan identitas nasional yang inklusif, terutama dalam konteks yang ditandai oleh keragaman sejarah dan budaya.

Sekolah menumbuhkan makna kebangsaan tidak hanya melalui pengajaran formal tetapi juga melalui praktik simbolis rutin—seperti upacara pengibaran bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, dan peringatan nasional yang berfungsi sebagai ruang sosial yang terinstitusionalisasi di mana rasa memiliki kolektif diwujudkan dan diperkuat. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pertunjukan kewarganegaraan terstruktur ini menumbuhkan identitas bersama dan keterikatan emosional di antara siswa sekolah menengah atas di Kota Davao. Interpretasi ini konsisten dengan konsep Hüning (2022) tentang mentalitas "kita" di sekolah, yang menunjukkan bahwa konteks sekolah yang secara aktif mempromosikan rasa memiliki kolektif secara signifikan terkait dengan tingkat keterlibatan kewarganegaraan siswa yang lebih tinggi. Dalam hal ini, ritual sekolah yang berulang berkontribusi pada pembangunan identitas "kita" bersama, memperkuat keterikatan kolektif pada bangsa

melalui partisipasi berulang dan terwujud.

Namun, data lapangan juga menegaskan bahwa pengulangan simbolik saja tidak secara otomatis mengarah pada internalisasi nilai. Efektivitas ritual sangat bergantung pada kerangka pedagogis dan konteks reflektif yang diberikan oleh guru. Catatan observasi dan diskusi kelompok fokus mengungkapkan perbedaan antara upacara yang disertai dengan penjelasan historis dan refleksi dialogis dan upacara yang dilakukan sebagai rutinitas prosedural. Tanpa keterlibatan interpretatif, ritual berisiko menjadi pertunjukan mekanis daripada pengalaman kewarganegaraan yang bermakna. Temuan ini selaras dengan kerangka kerja Literasi Keragaman Kritis Steyn dan Vanyoro (2024), yang menekankan pentingnya menghubungkan praktik simbolik dengan kesadaran kritis akan keragaman, keadilan, dan hubungan kekuasaan sosial. Dalam konteks multikultural seperti Kota Davao, ritual harus dibingkai secara inklusif dan kritis untuk memastikan bahwa nasionalisme dialami sebagai sesuatu yang transformatif dan bukan eksklusif.

Studi ini lebih lanjut menunjukkan bahwa ritual menjadi lebih berdampak ketika diintegrasikan dengan kesempatan partisipasi warga negara. Siswa melaporkan hubungan emosional yang lebih kuat dengan identitas nasional ketika upacara dikaitkan dengan pengabdian masyarakat, kampanye lingkungan, atau inisiatif penjangkauan yang terkait dengan perayaan nasional. Hal ini sejalan dengan Martini dkk. (2023), yang menemukan bahwa program pendidikan kewarganegaraan yang menggabungkan keterlibatan berorientasi tindakan dengan komponen reflektif secara signifikan meningkatkan komitmen kewarganegaraan dan rasa keberdayaan remaja. Dalam studi kami, data triangulasi dari wawancara, observasi, dan dokumen program mengungkapkan bahwa ketika ritual simbolik dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran pengalaman, siswa mengungkapkan rasa tanggung jawab yang lebih dalam terhadap komunitas mereka. Dengan demikian, ritual berfungsi paling efektif ketika dipadukan dengan kesempatan untuk partisipasi sipil di dunia nyata.

Selain itu, analisis tematik menunjukkan bahwa interpretasi

siswa terhadap ritual dibentuk oleh iklim kelas dan praktik pengajaran. Ketika guru memfasilitasi dialog kritis tentang makna simbol nasional dan menghubungkannya dengan isu-isu keadilan, pluralisme, dan partisipasi demokratis, siswa mengartikulasikan bentuk nasionalisme yang lebih reflektif dan inklusif. Temuan ini konsisten dengan karya Kim dan Kwon (2023) tentang Pendidikan Kewarganegaraan Global Kritis, yang berpendapat bahwa sikap sipil progresif berkembang ketika pendidik mendorong pembelajaran timbal balik, aktivisme, dan pemeriksaan kritis terhadap narasi nasional. Mediasi pedagogis yang diamati dalam penelitian ini menegaskan bahwa dialog reflektif mengubah ritual menjadi pembelajaran sipil yang bermakna, memperkuat persamaan yang diidentifikasi dalam data: ritual ditambah interpretasi guru menghasilkan internalisasi yang lebih dalam.

Terakhir, hasil penelitian mendukung interpretasi patriotisme yang konstruktif—yaitu interpretasi yang mengintegrasikan keterikatan nasional dengan kritik yang bertanggung jawab dan tindakan kolektif. Siswa dalam penelitian ini

tidak menyamakan nasionalisme dengan loyalitas buta; Sebaliknya, mereka menggambarkan patriotisme sebagai sesuatu yang berkontribusi positif terhadap peningkatan masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan temuan Simić (2024) tentang patriotisme konstruktif, yang menunjukkan bahwa kecintaan kritis terhadap negara berhubungan positif dengan tindakan kolektif dan keterlibatan inovatif secara sosial. Dalam konteks multikultural Kota Davao, hal ini menunjukkan bahwa ritual sekolah, jika dikombinasikan dengan dialog reflektif dan kesempatan partisipatif, dapat menumbuhkan nasionalisme yang inklusif dan berlandaskan demokrasi. Didukung oleh triangulasi kualitatif sistematis, penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan identitas nasional yang bermakna tidak hanya membutuhkan pengulangan simbolis tetapi juga keterlibatan kritis, inklusivitas, dan partisipasi warga negara yang aktif.

D. Kesimpulan

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pembentukan karakter menumbuhkan nasionalisme di kalangan siswa

sekolah menengah atas di Kota Davao, Filipina. Secara khusus, studi ini berupaya memahami cara-cara di mana nilai-nilai nasional diintegrasikan ke dalam praktik sekolah, bagaimana dimensi simbolik dan relasional pendidikan berkontribusi pada pembentukan identitas nasional, dan bagaimana siswa menafsirkan dan mewujudkan nasionalisme dalam konteks multikultural. Berdasarkan temuan yang diperoleh dari wawancara, diskusi kelompok fokus, observasi kelas, dan analisis dokumen, dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter memainkan peran yang signifikan dan multidimensional dalam membentuk pemahaman dan praktik nasionalisme siswa.

Berkaitan dengan tujuan pertama—memeriksa integrasi nilai-nilai nasional dalam kurikulum formal—studi ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter berbasis kurikulum menyediakan kerangka dasar untuk menumbuhkan nasionalisme. Namun, internalisasi identitas nasional tidak hanya bergantung pada keberadaan konten kewarganegaraan tetapi juga pada bagaimana konten tersebut disampaikan. Ketika guru

mengkontekstualisasikan narasi sejarah dan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam realitas kehidupan siswa, khususnya dinamika sosial-budaya Mindanao, siswa mengembangkan interpretasi nasionalisme yang reflektif dan inklusif. Dengan demikian, integrasi kurikulum yang efektif membutuhkan pedagogi dialogis yang mendorong pemikiran kritis daripada hafalan.

Mengenai tujuan kedua—menganalisis peran ritual sekolah dan praktik simbolik—studi ini menyimpulkan bahwa upacara yang terinstitusionalisasi seperti ritual pengibaran bendera dan peringatan nasional memperkuat identitas kolektif dan keterikatan emosional terhadap simbol-simbol nasional. Praktik-praktik ini berfungsi sebagai kesempatan terstruktur untuk ekspresi kewarganegaraan bersama. Namun demikian, dampaknya dimaksimalkan hanya jika disertai dengan penjelasan reflektif dan keterlibatan yang bermakna. Tanpa kerangka pedagogis, ritual berisiko menjadi formalitas prosedural. Oleh karena itu, praktik simbolik harus diintegrasikan dengan dialog interpretatif untuk berkontribusi secara efektif pada pembentukan karakter.

Berkaitan dengan tujuan ketiga—memahami pengaruh pemodelan guru dan otoritas moral—temuan menunjukkan bahwa guru berperan sebagai agen sentral pembentukan karakter. Siswa menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dan nasional melalui pengamatan perilaku etis guru, keadilan, inklusivitas, dan keterbukaan terhadap diskusi demokratis. Oleh karena itu, nasionalisme dibentuk tidak hanya oleh isi kurikulum tetapi juga oleh pengalaman relasional di dalam kelas. Keaslian guru memperkuat kepercayaan siswa dan mendorong bentuk-bentuk patriotisme yang berlandaskan tanggung jawab dan kesadaran kritis, bukan loyalitas tanpa pertanyaan.

Terakhir, menanggapi tujuan untuk memeriksa agensi siswa dalam lingkungan multikultural, penelitian ini menyimpulkan bahwa siswa mengkonseptualisasikan nasionalisme dalam istilah inklusif dan partisipatif. Dalam konteks sosial yang beragam di Kota Davao, nasionalisme diartikan sebagai persatuan dalam keberagaman dan kontribusi aktif terhadap peningkatan masyarakat. Siswa yang terlibat dalam

kepemimpinan dan kegiatan komunitas menunjukkan komitmen kewarganegaraan yang lebih kuat, menunjukkan bahwa partisipasi pengalaman meningkatkan transformasi identitas nasional menjadi kewarganegaraan praktis. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter paling efektif ketika sekolah menyediakan kesempatan untuk keterlibatan kewarganegaraan yang bermakna bersamaan dengan praktik simbolik dan instruksional.

Singkatnya, esensi dari penelitian ini menegaskan bahwa memupuk nasionalisme melalui pembentukan karakter membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi. Integrasi kurikulum, ritual simbolik, pemodelan guru, dan partisipasi siswa harus beroperasi secara kohesif dalam lingkungan pendidikan yang mendukung. Identitas nasional di kalangan siswa muncul sebagai reflektif, inklusif, dan berorientasi demokratis ketika elemen-elemen ini selaras. Oleh karena itu, lembaga pendidikan yang berupaya memperkuat nasionalisme harus memprioritaskan pedagogi reflektif, kepemimpinan etis, dan pengalaman kewarganegaraan partisipatif untuk

memastikan bahwa pendidikan karakter menghasilkan warga negara yang bertanggung jawab dan terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Archuleta, K. R. C. (n.d.). *Exploring the relationship between literary appreciation skills and academic performance among students.*
- Banks, J. A. (2017). *Citizenship education and global migration: Implications for theory, research, and teaching.* American Educational Research Association.
- Barbieto, E., DelaPeña, L. V. C., Padilla, A. A., Romero, A. N., Ildefonso, C. L., Cabrera, D. C., & Vicente, P. M. (2024). Perceived level of nationalism among senior high school students and its relationship to their attitude towards history. *Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal*, 20(9), 1–11.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>

- Castilla, D. G., Duterte, P. J. C., Sasing, J. J. G., Tabacon, S. L., & Veloso, Y. N. I. (2024). Assessing human population dynamics and climate change in vulnerable communities in Barangay Ibo, Lapu-Lapu, Cebu. *International Journal of Earth & Environmental Sciences (IJEES)*, 9(1), 51–58.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hüning, H. (2022). Schools' mentality and students' civic engagement. *Child Indicators Research*. <https://doi.org/10.1007/s12187-022-09954-0>
- Isac, M. M., Maslowski, R., & Van der Werf, G. (2018). Civic engagement of lower-secondary students: The role of school climate and civic education. *School Effectiveness and School Improvement*, 29(2), 261–285. <https://doi.org/10.1080/09243453.2017.1408913>
- Kennedy, K. J. (2019). Civic and citizenship education in volatile times: Preparing students for citizenship in the 21st century. *Education Sciences*, 9(3), 196. <https://doi.org/10.3390/educsci9030196>
- Kim, Y., & Kwon, J. (2023). Critical global citizenship education for transnational youth: Advancing justice and activism and promoting reciprocal learning. *Teaching and Teacher Education*, 132, 104269. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104269>
- Knowles, R. T., & Castro, A. J. (2019). The implications of ideology for civic education. *Theory & Research in Social Education*, 47(1), 1–17.
- Knowles, R. T., & Clark, C. H. (2018). Ideological foundations of civic education: A critical review. *Theory & Research in Social Education*, 46(1), 1–30.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Lopez, A., & Lorejo, R. (2023). Effectiveness of enhanced basic education information system (EBEIS)/Learner Information System (LIS) data and school management.
- Martini, M., Rollero, C., Rizzo, M., Di Carlo, S., De Piccoli, N., & Fedi, A. (2023). Educating youth to civic engagement for social justice: Evaluation of a secondary school project. *Behavioral Sciences*, 13(8), 650. <https://doi.org/10.3390/bs13080650>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Neumann, H. (2020). Identity-building and democracy in the Philippines: National failure and local responses in Mindanao. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29(3), 61–90.
- Nucci, L., Narvaez, D., & Krettenauer, T. (2014). *Handbook of moral and character education* (2nd ed.). Routledge.
- Paqueo, V. B., Sister, J. M. A. A., Sarne, S. R., Abrigo, M. R. M., Orbeta, A. C., Maddawin, R. B., & Lavega, M. L. Y. U. (2025). *Strengthening and expanding government assistance for private education* (Discussion Paper No. 2025-17). Philippine Institute for Development Studies (PIDS).
- Reichert, F., Chen, J., & Torney-Purta, J. (2018). Profiles of adolescents' perceptions of democratic classroom climate and students' influence: The effect on civic engagement. *Youth & Society*, 50(5), 613–635. <https://doi.org/10.1177/0044118X16642702>
- Riski, Y. T., Huda, M. N., Coralde, M. J. C., & Andajani, S. J. (2023). Descriptive study: Implementation of character education in the dormitory of the Indonesian school of Davao, Philippines. *Metodik Didaktik*, 18(2), 65–74.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Simić, A. (2024). Being critical is innovative: Constructive patriotism and collective actions are related to social entrepreneurship intentions. *Social Psychological Bulletin*, 19, Article e12705. <https://doi.org/10.32872/spb.12705>
- Steyn, M., & Vanyoro, K. P. (2024). Critical diversity literacy: A framework for multicultural citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 19(3). <https://doi.org/10.1177/17461979231178520>
- UNESCO. (2015). *Global citizenship education: Topics and learning objectives*. UNESCO Publishing.
- Vetruba, B. (2024). *German studies: Handbook for European studies librarians*.
- Westheimer, J. (2019). Civic education and the rise of populist nationalism. *Peabody Journal of Education*, 94(1), 4–16. <https://doi.org/10.1080/0161956X.2019.1553581>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications